



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 105 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, wajib dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu melakukan perubahan terhadap Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 123);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 112);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 3);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Tugas Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 antara lain:

- a. menyusun jadwal kegiatan Musrenbang RKPD di Kelurahan;
- b. menyediakan hasil Musrenbang RW satu tahun sebelumnya yang belum terealisasi, sebagai bahan Musrenbang RW;
- c. menerima usulan kegiatan hasil Musrenbang RW sebagaimana Form R2;
- d. menerima usulan kegiatan dari lembaga kemasyarakatan kelurahan selain RW dan RT serta kelompok masyarakat di Kelurahan sebagaimana Form R4;
- e. melaksanakan verifikasi usulan kegiatan yang tercantum dalam form R2 dan form R4;
- f. melakukan rekapitulasi hasil verifikasi usulan kegiatan RW dalam Form L1;
- g. melakukan rekapitulasi usulan kegiatan dari lembaga kemasyarakatan kelurahan selain RW dan RT serta kelompok masyarakat di Kelurahan dalam Form L2;
- h. mengelompokkan usulan prioritas kegiatan yang akan dianggarkan dalam ADKel dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan;
- i. menyiapkan informasi hasil telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
- j. mendistribusikan undangan kepada peserta dilampiri bahan Musrenbang RKPD di Kelurahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan;
- k. menyiapkan paparan Lurah;
- l. menyiapkan sarana dan perlengkapan Musrenbang RKPD di Kelurahan antara lain daftar hadir, notulen rapat, berita acara hasil Musrenbang RKPD di Kelurahan, tempat/ruang rapat yang representatif, dan kelengkapan lainnya yang diperlukan; dan
- m. mengatur pelaksanaan musyawarah.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kelompok kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mengacu pada tema tahunan RPJMD.
- (2) Kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) bidang yaitu:
 - a. Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah pengampu sebagai berikut:
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 3. Dinas Kesehatan;
 4. Dinas Sosial;
 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 9. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 11. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
- b. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur dengan Perangkat Daerah pengampu sebagai berikut:
1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan;
 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 3. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 7. Dinas Penanaman Modal;
 8. Dinas Perhubungan; dan
 9. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Kelurahan dengan tiga nilai evaluasi tertinggi dapat memperoleh tambahan alokasi pagu indikatif pada penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kelurahan tahun berikutnya disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
- (2) Tambahan alokasi pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Tugas Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 antara lain:

- a. menyusun jadwal kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan;
- b. melakukan rekapitulasi hasil Musrenbang Desa, Musrenbang RKPD di Kelurahan, dan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- c. melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan atas hasil musyawarah bidang;
- d. menyiapkan bahan musrenbang RKPD di Kecamatan;
- e. mendistribusikan undangan kepada peserta dilampiri bahan Musrenbang RKPD di Kecamatan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan;
- f. menyiapkan paparan Camat;
- g. menyiapkan sarana dan perlengkapan Musrenbang RKPD di Kecamatan antara lain daftar hadir, notulen rapat, berita acara hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan, tempat/ruang rapat yang representatif dan kelengkapan lainnya yang diperlukan; dan
- h. mengatur pelaksanaan musyawarah.

5. Ketentuan ayat (6) Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Bahan Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 36 huruf d terdiri dari:
 - a. rekapitulasi hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang dituangkan dalam Form C1A dan Form C1B; dan
 - b. hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.
- (2) Rekapitulasi hasil Musrenbang Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. usulan prioritas kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah; dan
 - b. usulan prioritas kegiatan yang merupakan kewenangan Desa dan kegiatan skala Kelurahan yang tidak terakomodir dalam ADKel;
- (3) Hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pokok-pokok pikiran DPRD yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan;
- (4) Usulan prioritas kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a maksimal 3 (tiga) kegiatan perbidang dengan Perangkat Daerah Pengampu yang berbeda yang selanjutnya akan dibahas pada musyawarah bidang;
- (5) Usulan prioritas kegiatan dan kegiatan skala Kelurahan yang tidak terakomodir dalam ADKel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maksimal sebanyak 3 (tiga) usulan kegiatan yang selanjutnya digunakan sebagai:
 - a. bahan masukan bagi PD untuk menentukan lokasi kegiatan pada saat Forum Internal PD; dan
 - b. bahan masukan bagi perusahaan untuk menyusun jenis dan lokasi kegiatan yang bersumber dari dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Perusahaan (TJSLP) atau dari sumber dana yang lain.
- (6) Rekapitulasi hasil Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan hasil Musrenbang di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagi dalam 2 (dua) kelompok pembidangan, yaitu:
 - a. Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah pengampu sebagai berikut:
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 3. Dinas Kesehatan;
 4. Dinas Sosial;
 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 9. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 11. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - b. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur dengan Perangkat Daerah pengampu sebagai berikut:
 1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan;
 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 3. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
 5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Penanaman Modal;
8. Dinas Perhubungan; dan
9. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Narasumber Musrenbang RKPD di Kecamatan adalah:
 - a. tim Asistensi Musrenbang RKPD Kabupaten;
 - b. anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan;
 - c. perwakilan Perangkat Daerah; dan
 - d. unsur forum koordinasi pimpinan di kecamatan: Camat, Komandan Rayon Militer, dan Kepala Kepolisian Sektor.
- (2) Tim Asistensi Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. sosialisasi tata cara pelaksanaan Musrenbang;
 - b. melakukan pendampingan dalam penyusunan bahan musrenbang sesuai dengan kelompok, pembidangan, dan perangkat daerah pengampu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 37;
 - c. melakukan pendampingan dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan; dan
 - d. melakukan validasi atas verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan terhadap usulan prioritas kegiatan hasil musyawarah pleno.
- (3) Narasumber Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah pengampu sebagai berikut:
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 3. Dinas Kesehatan;
 4. Dinas Sosial;
 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 9. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 11. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - b. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur dengan Perangkat Daerah pengampu sebagai berikut:
 1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan;
 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 3. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
 5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 7. Dinas Penanaman Modal;
 8. Dinas Perhubungan; dan
 9. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;

- (4) Narasumber Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas:
1. memberikan informasi dan data-data kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dalam diskusi bidang;
 2. menyampaikan kelayakan kajian teknis dan anggaran; dan
 3. mengikuti seluruh kegiatan ini sampai dengan selesai.
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Pagu indikatif Kecamatan dapat diberikan dengan besaran pagu setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari pendapatan yang bersumber dari alokasi dana perimbangan setelah dikurangi pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya.
 - (2) Pagu indikatif Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pagu indikatif umum; dan/atau
 - b. pagu indikatif tematik.
 - (3) Pagu indikatif umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu indikatif Kecamatan.
 - (4) Pagu indikatif tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu indikatif Kecamatan.
 - (5) Besaran pagu indikatif masing-masing kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kondisi kemampuan keuangan daerah.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Tiga Kecamatan dengan nilai evaluasi tertinggi dapat memperoleh tambahan alokasi pagu indikatif pada penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan tahun berikutnya disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
 - (2) Tambahan alokasi pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Ketentuan Form L15 dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Form C12 dalam Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung,
pada tanggal 10 Desember 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 10 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 105



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 105 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN
 MUSYAWARAH PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN RENCANA KERJA
 PEMERINTAH DAERAH

STANDAR NILAI SKOR DAN FORMAT DOKUMEN
 PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN

I. STANDAR NILAI SKOR

NILAI SKORING
 DALAM PENILAIAN PRIORITAS USULAN KEGIATAN
 PADA MUSYAWARAH BIDANG

No	INDIKATOR	KONDISI INDIKATOR	SKOR
1	2	3	4
1	Kesesuaian dengan Tema Tahunan RPJMD		
		Tidak sesuai Tema Tahunan	0
		Sesuai Tema Tahunan	50
2	Urgensi		
		Tidak ada urgensi	1 s/d 5
		Sangat tidak mendesak	6 s/d 10
		Tidak mendesak	11 s/d 15
		Mendesak	16 s/d 20
		Sangat mendesak	21 s/d 25
3	Jumlah Penerima Manfaat (Orang)		
		≤ 10	1 s/d 5
		10 – 20	6 s/d 10
		20 – 30	11 s/d 15
		31 – 40	16 s/d 20
		> 40	21 s/d 25
4	Cakupan Manfaat		
		Dalam satu RT	1 s/d 5
		Antar RT dalam satu RW	6 s/d 10
		Antar RW dalam satu Kelurahan	11 s/d 15
		Antar Kelurahan dalam satu Kecamatan	16 s/d 20

Keterangan :

1. Kolom 2 : Indikator yang dinilai
 - Indikator urgensi/kemendesakan adalah untuk menilai kegiatan yang harus segera diselesaikan.
 - Indikator jumlah penerima manfaat adalah untuk menilai kegiatan dengan mempertimbangkan jumlah penerima manfaat.
 - Indikator cakupan manfaat adalah untuk menilai kegiatan dengan mempertimbangkan jangkauan luas wilayah penerima manfaat.
2. Kolom 3 : Kondisi indikator usulan kegiatan
3. Kolom 4 : Standar skor/nilai menjadi hak dan menurut penilaian pribadi peserta

II. FORMAT DOKUMEN MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS TINGKAT RW

I. Permasalahan Pembangunan Sarana dan Prasarana

- 1. Sarana dan prasarana lingkungan pemukiman
 - a. Permasalahan
 -
 -
 - b. Pemecahan Masalah
 -
 -
- 2. Sarana dan prasarana transportasi
 - a. Permasalahan
 -
 -
 - b. Pemecahan Masalah
 -
 -
- 3. Sarana prasarana kesehatan
 - a. Permasalahan
 -
 -
 - b. Pemecahan Masalah
 -
 -
- 4. Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, meliputi:
 - a. Permasalahan
 -
 -
 - b. Pemecahan Masalah
 -
 -
- 5. Sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
 - a. Permasalahan
 -
 -
 - b. Pemecahan Masalah
 -
 -
- 6. Sarana dan prasarana jaringan internet (*bandwidth*) lingkungan
 - a. Permasalahan
 -
 -
 - b. Pemecahan Masalah
 -
 -

7. Sarana dan prasarana olah raga
 - a. Permasalahan
 -
 -
 - b. Pemecahan Masalah
 -
 -
8. Sarana dan prasarana peternakan dan perikanan komunal
 - a. Permasalahan
 -
 -
 - b. Pemecahan Masalah
 -
 -
9. Dst (sesuai permasalahan yang ada di masing-masing wilayah)
 - a. Permasalahan
 -
 -
 - b. Pemecahan Masalah
 -
 -

II. Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat

1. Permasalahan
 - a.
 - b.
2. Pemecahan Masalah
 - a.
 - b.

III. Isu Strategis

1.
2.

Kelurahan,

Ketua RW
Kelurahan

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

.....

USULAN PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN
HASIL MUSRENBANG RW
RW KELURAHAN

No	Permasalahan	Isu Strategis	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi	Penerima Manfaat	Volume	Pagu
1								
2								
3								

Kelurahan,

Ketua RW
Kelurahan

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

.....

BERITA ACARA MUSRENBANG RW
KELURAHAN KECAMATAN

Pada hari tanggal bulan tahun bertempat di telah diselenggarakan Musrenbang RW Kelurahan yang dihadiri Orang sebagaimana daftar hadir peserta dalam lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan tanggapan, masukan, serta saran dari seluruh peserta musyawarah terhadap materi yang dibahas dalam Musrenbang RW, menyepakati:

1. Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis sebagaimana Form R1 terlampir.
2. Usulan prioritas kegiatan pembangunan sebagaimana Form R2 terlampir.
3. Usulan prioritas kegiatan pembangunan sebagaimana Form R4 terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kelurahan,

Ketua RW
Kelurahan

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

.....

Perwakilan Peserta Musrenbang RW

No	Nama	Unsur	Tanda Tangan
1			
2			
3			

USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN SELAIN RW DAN RT SERTA KELOMPOK MASYARAKAT DI KELURAHAN
LEMBAGA / KELOMPOK MASYARAKAT KELURAHAN

No	Permasalahan	Isu Strategis	Kegiatan	Indikator Kegiatan	lokasi	Penerima Manfaat	Volume	Pagu
1								
2								
3								

Kelurahan,

Ketua RW
Kelurahan

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

.....

VERIFIKASI
USULAN PRIORITAS KEGIATAN HASIL MUSRENBANG RW
KELURAHAN KECAMATAN

Telah dilakukan verifikasi usulan prioritas kegiatan hasil Musrenbang RW ...
pada hari tanggal bulan tahun dengan hasil sebagai
berikut:

1. Kegiatan :

2. RAB

a. ada/tidak

b. Catatan Tim Verifikasi :

.....
.....
.....
.....

3. Foto

a. ada/tidak

b. Kesesuaian Foto dengan Lokasi : sesuai/tidak

4. Denah Lokasi

a. Ada/tidak

b. Kesesuaian Lokasi dengan Denah Lokasi

5. Status Tanah :

a. Kewenangan : Kelurahan/Kabupaten/Provinsi /Nasional

b. Milik Perseorangan :

Musyawarah dengan warga : sudah/belum

Jika sudah, bukti hasil musyawarah : ada/tidak

c. Hasil Akhir Verifikasi : Layak/Tidak Layak

d. Keterangan : -

-

TIM VERIFIKASI HASIL MUSRENBANG RW

No	Nama	Unsur	Tanda Tangan
1			
2			
3			

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI USULAN KEGIATAN RW YANG DINYATAKAN LAYAK

Form: L1

No	Permasalahan	Isu Strategis	Kegiatan	Indikator Kegiatan	lokasi	Penerima Manfaat	Volume	Pagu
1								
2								
3								

Kelurahan,

Lurah
Kelurahan

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

.....

REKAPITULASI USULAN KEGIATAN DARI LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
SELAIN RW DAN RT SERTA KELOMPOK MASYARAKAT DI KELURAHAN

Form: L2

No	Permasalahan	Isu Strategis	Kegiatan	Indikator Kegiatan	lokasi	Penerima Manfaat	Volume	Pagu	Nama Kelompok
1									
2									

Kelurahan,

Lurah
Kelurahan

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

.....

BAHAN MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN TAHUN
 KELOMPOK KEGIATAN UNTUK DIANGGARKAN DALAM ADKEL

No	Kelompok Kegiatan	Prioritas Permasalahan	Prioritas Kegiatan	Indikator Kegiatan	lokasi	Penerima Manfaat	Volume	Pagu
A	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LOKAL KELURAHAN		1.					
			2.					
			3. dst					
B	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN		1.					
			2.					
			3. dst					
C	OPERASIONAL LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN		1.					
			2.					
			3. dst					
	JUMLAH							

Kelurahan,

Lurah
 Kelurahan

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

.....

BAHAN MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN TAHUN.....
 KELOMPOK KEGIATAN UNTUK DIUSULKAN DALAM MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN
 BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN

No	Tema Tahunan RPJMD Tahun	Kebijakan Prioritas Tahunan RPJMD	Program	Prioritas Kegiatan	Indikator Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	PD pengampu

Kelurahan,

Lurah
Kelurahan

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

.....

BAHAN MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN TAHUN.....
KELOMPOK KEGIATAN UNTUK DIUSULKAN DALAM MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN
BIDANG EKONOMI, SUMBERDAYA ALAM, DAN INFRASTRUKTUR

No	Tema Tahunan RPJMD Tahun	Kebijakan Prioritas Tahunan RPJMD	Program	Prioritas Kegiatan	Indikator Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	PD pengampu

Kelurahan,

Lurah
Kelurahan

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

.....

FORM PENILAIAN PESERTA

ATAS USULAN PRIORITAS KEGIATAN YANG AKAN DIUSULKAN PADA MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN

NO	Tema Tahunan RPJMD Tahun	Kebijakan Prioritas Tahunan RPJMD Tahun	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	LOKASI	VOLUME	PAGU(Rp)	SKOR				JUMLAH SKOR
										KESESUAIAN DENGAN TEMA RPJMD	URGENSI	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	CAKUPAN MANFAAT	

Peserta,

.....

FORM PENILAIAN PESERTA
 ATAS USULAN PRIORITAS KEGIATAN YANG AKAN DIUSULKAN PADA MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN

BIDANG EKONOMI, SUMBERDAYA ALAM, DAN INFRASTRUKTUR

NO	Tema Tahunan RPJMD Tahun	Kebijakan Prioritas Tahunan RPJMD Tahun	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	LOKASI	VOLUME	PAGU(Rp)	SKOR				JUMLAH SKOR
										KESESUAIAN DENGAN TEMA RPJMD	URGENSI	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	CAKUPAN MANFAAT	

Peserta,

.....

REKAPITULASI PENILAIAN PESERTA ATAS USULAN PRIORITAS KEGIATAN YANG AKAN DIUSULKAN PADA MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN

No	KEGIATAN	NAMA PESERTA MUSYAWARAH BIDANG								JUMLAH SKOR	KETERANGAN
1											
2											
3											
4											

Kelurahan,

Ketua Musyawarah Bidang

.....

REKAPITULASI PENILAIAN PESERTA ATAS USULAN PRIORITAS KEGIATAN YANG AKAN DIUSULKAN PADA MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN
 BIDANG EKONOMI, SUMBERDAYA ALAM, DAN INFRASTRUKTUR

No	KEGIATAN	NAMA PESERTA MUSYAWARAH BIDANG								JUMLAH SKOR	KETERANGAN
1											
2											
3											
4											

Kelurahan,

Ketua Musyawarah Bidang

.....

DAFTAR URUTAN USULAN PRIORITAS KEGIATAN YANG AKAN DIUSULKAN PADA MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN
HASIL MUSYAWARAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN

No	Tema Tahunan RPJMD Tahun	Kebijakan Prioritas Tahunan RPJMD	Program	Prioritas Kegiatan	Indikator Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi (alamat lengkap)	Volume	Pagu	PD pengampu

Kelurahan,

Ketua Musyawarah Bidang,

.....

Mewakili Peserta Musyawarah Bidang

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				

DAFTAR URUTAN USULAN PRIORITAS KEGIATAN YANG AKAN DIUSULKAN PADA MUSRENBANG RKPDI KEKAMATAN
HASIL MUSYAWARAH BIDANG EKONOMI, SUMBERDAYA ALAM, DAN INFRASTRUKTUR

No	Tema Tahunan RPJMD Tahun	Kebijakan Prioritas Tahunan RPJMD	Program	Kegiatan Prioritas	Indikator Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi (alamat lengkap)	Volume	Pagu	PD pengampu

Temanggung,
Ketua Musyawarah Bidang,

.....

Mewakili Peserta Musyawarah Bidang

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN

I. Permasalahan

1.

a. Permasalahan

-
-

b. Pemecahan Masalah

-
-

2.

a. Permasalahan

-
-

b. Pemecahan Masalah

-
-

II. Permasalahan

1. Permasalahan

-
-

2. Pemecahan Masalah

-
-

III. Isu Strategis

1.

2.

Kelurahan,

Ketua Musyawarah
Bidang,

Tanda Tangan dan Nama Terang

.....

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS
BIDANG EKONOMI, SUMBER DAYA ALAM, DAN INFRASTRUKTUR

- I. Permasalahan
 - 1.
 - a. Permasalahan
 -
 -
 - b. Pemecahan Masalah
 -
 -
 - 2.
 - a. Permasalahan
 -
 -
 - b. Pemecahan Masalah
 -
 -
- II. Permasalahan
 - 1. Permasalahan
 -
 -
 - 2. Pemecahan Masalah
 -
 -
- III. Isu Strategis
 - 1.
 - 2.

Kelurahan,

Ketua Musyawarah
Bidang,

Tanda Tangan dan Nama Terang

.....

BERITA ACARA MUSYAWARAH
 BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN
 KELURAHAN KECAMATAN

Pada hari tanggal bulan tahun bertempat di telah diselenggarakan Musyawarah Bidang Kelurahan yang dihadiri Orang sebagaimana daftar hadir peserta dalam lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan tanggapan, masukan, serta saran dari seluruh peserta musyawarah terhadap materi yang dibahas dalam Musyawarah Bidang, menyepakati:

1. Daftar urutan usulan prioritas kegiatan sebagaimana Form L7A terlampir.
2. Permasalahan pembangunan dan isu strategis sebagaimana Form L8A terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris
 Bidang

Tanda Tangan dan Nama Terang

.....

Kelurahan,

Ketua Musyawarah
 Bidang

Tanda Tangan dan Nama Terang

.....

Perwakilan Peserta Musyawarah
 Bidang

No	Nama	Unsur	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			

BERITA ACARA MUSYAWARAH
 BIDANG EKONOMI, SUMBERDAYA ALAM, DAN INFRASTRUKTUR
 KELURAHAN KECAMATAN

Pada hari tanggal bulan tahun bertempat di telah diselenggarakan Musyawarah Bidang Kelurahan yang dihadiri Orang sebagaimana daftar hadir peserta dalam lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan tanggapan, masukan, dan saran dari seluruh peserta musyawarah terhadap materi yang dibahas dalam Musyawarah Bidang, menyepakati:

1. Daftar urutan usulan prioritas kegiatan sebagaimana Form L7B terlampir.
2. Permasalahan pembangunan dan isu strategis sebagaimana Form L8B terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris
 Bidang

Tanda Tangan dan Nama Terang

.....

Kelurahan,

Ketua Musyawarah
 Bidang

Tanda Tangan dan Nama Terang

.....

Perwakilan Peserta Musyawarah
 Bidang

No	Nama	Unsur	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			

USULAN PRIORITAS KEGIATAN DENGAN SUMBER DANA ALOKASI DANA KELURAHAN (ADKEL)
HASIL MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN KECAMATAN

No	Kelompok Kegiatan	Prioritas Permasalahan	Prioritas Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi (alamat lengkap)	Penerima Manfaat	Volume	Pagu
A	operasional lembaga kemasyarakatan kelurahan							
B	Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Lokal Kelurahan							
C	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan							
	JUMLAH							

Kelurahan,

Mengetahui
LURAH,

Ketua LPMK,

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

.....

.....

Mewakili peserta Musrenbang RKPD di Kelurahan

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat
1			
2			
3			

USULAN PRIORITAS KEGIATAN YANG AKAN DIUSULKAN PADA MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN
 BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN
 SUMBER DANA APBD KABUPATEN

No	Tema Tahunan RPJMD Tahun	Kebijakan Prioritas Tahunan RPJMD	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	PD pengampu

Kelurahan,

Mengetahui
 LURAH,

Ketua LPMK,

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

Mewakili peserta Musrenbang RKPD di Kelurahan

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				

USULAN PRIORITAS KEGIATAN YANG AKAN DIUSULKAN PADA MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN
 BIDANG EKONOMI, SUMBER DAYA ALAM, DAN INFRASTRUKTUR
 SUMBER DANA APBD KABUPATEN

No	Tema Tahunan RPJMD Tahun	Kebijakan Prioritas Tahunan RPJMD	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	PD pengampu

Kelurahan,

Mengetahui
LURAH,

Ketua LPMK,

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

.....

.....

Mewakili peserta Musrenbang RKPD di Kelurahan

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				

USULAN PRIORITAS KEGIATAN YANG AKAN DIUSULKAN PADA MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN
SUMBER DANA APBD PROVINSI

No	Prioritas Kegiatan	Indikator Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	PD pengampu

Kelurahan,

Mengetahui
LURAH,

Ketua LPMK,

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang
.....

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang
.....

Mewakili peserta Musrenbang RKPD di Kelurahan

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				

USULAN PRIORITAS KEGIATAN YANG AKAN DIUSULKAN PADA MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN
SUMBER DANA APBN

No	Prioritas Kegiatan	Indikator Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	PD pengampu

Mengetahui
LURAH

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang
.....

Kelurahan,

Ketua LPMK,

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang
.....

Mewakili peserta Musrenbang RKPD di Kelurahan

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				

DAFTAR USULAN KEGIATAN YANG BELUM DIAKOMODIR

TAHUN :

KELURAHAN:

PERANGKAT DAERAH:

No	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ALASAN
1	2	3	4	5

Kelurahan,

LURAH,

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

.....

DELEGASI KELURAHAN
PADA MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN

NO	NAMA	ALAMAT	LEMBAGA/INSTANSI/UNSUR
1			
2			
3			

Kelurahan,

LURAH,

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

.....

Mewakili peserta Musrenbang RKPD di Kelurahan

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1		(unsur LPMK)		
2		(unsur lembaga lainnya)		
3		(wakil perempuan)		

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PLENO PADA MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN
.....

Pada hari tanggal bulan tahun bertempat di telah diselenggarakan Musyawarah Pleno pada Musrenbang RKPD di Kelurahan yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan tanggapan dan saran dari seluruh peserta musyawarah kelompok terhadap materi yang dibahas dalam Musyawarah Pleno sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Musyawarah, maka pada:

Hari dan Tanggal :
J a m :
Tempat :

MENYEPAKATI:

- KESATU : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas Bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.
- KEDUA : Hasil kesepakatan musyawarah pleno dalam Musrenbang RKPD di Kelurahan Kecamatan Tahun dan Daftar Hadir Peserta Musyawarah Pleno sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KETIGA : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan pelaksanaan penetapan prioritas program dan kegiatan yang dianggarkan pada Alokasi dana Kelurahan dan usulan prioritas kegiatan yang akan diusulkan pada Musrenbang RKPD di Kecamatan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kelurahan,

Lurah,

Ketua LPMK,

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

.....

.....

Mewakili peserta Musrenbang RKPD di Kelurahan

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				

III. FORMAT EVALUASI PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN

Form: L15

KUESIONER
EVALUASI PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN
TAHUN
KELURAHAN

I. Data Umum							
1	Nama Kelurahan	:					
2	Kecamatan	:					
3	Jumlah RW/lingkungan	:					
4	Tanggal Musrenbang						
	Hari I	:					
	Hari II	:					
5	Tempat						
	Hari I	:					
	Hari II	:					
II. Tahap Persiapan							
No.	Unsur yang Dinilai	Kriteria		Skor	Skor Evaluasi	Keterangan	Catatan
1	Jadwal pelaksanaan Musrenbang RW se Kelurahan	a.	Jadwal pelaksanaan Musrenbang RW tertulis dan bertanda tangan lurah	100		Jadwal tertulis dan bertandatangan Lurah	
		b.	Jadwal pelaksanaan Musrenbang RW tertulis tapi tidak bertanda tangan Lurah	50			
		c.	Tidak ada	0			
2	Waktu pelaksanaan Musrenbang RW	a.	Apabila seluruh RW melaksanakan Musrenbang RW \geq 10 hari sebelum Musrenbang RKPD di Kelurahan	100		Selambat-lambatnya 10 hari sebelum Musrenbang RKPD di Kelurahan	
		b.	Apabila $>75\%$ total RW yang ada melaksanakan Musrenbang RW \geq 10 hari sebelum Musrenbang RKPD di Kelurahan	75 - 99			
		c.	Apabila $<75\%$ total RW yang ada melaksanakan Musrenbang RW \geq 10 hari sebelum Musrenbang RKPD di Kelurahan	50 - 74			
		d.	Apabila $<25\%$ total RW yang ada melaksanakan Musrenbang RW <10 hari sebelum Musrenbang RKPD di Kelurahan	25 - 49			
		e.	Apabila seluruh RW melaksanakan Musrenbang RW <10 hari sebelum Musrenbang RKPD di Kelurahan	5 - 24			
3	Pengiriman undangan Musrenbang RKPD Kelurahan ke peserta	a.	Terdapat undangan Musrenbang RKPD Kelurahan dan tanda terima undangan ke semua peserta, dikirimkan \geq 3 hari sebelum pelaksanaan	100		- Selambat-lambatnya 3 hari sebelum Musrenbang RKPD di Kelurahan - Tanda terima undangan	
		b.	Terdapat undangan Musrenbang RKPD, tanda terima ke sebagian peserta, dikirimkan \geq 3 hari sebelum pelaksanaan	75 - 99			
		c.	Terdapat undangan Musrenbang RKPD, tanpa tanda terima undangan, dikirimkan \geq 3 hari sebelum pelaksanaan	50 - 74			

		d.	Terdapat undangan Musrenbang RKPD, tanpa tanda terima undangan, dikirimkan ≤ 3 hari sebelum pelaksanaan	25 - 49			
		e.	Tidak ada undangan Musrenbang RKPD	0			
4	Undangan dilampiri bahan (rekap usulan Musrenbang RW)	a.	Bahan dilampirkan pada undangan beserta tanda terima bahan	100		- Undangan harus dilampiri bahan Musrenbang RKPD Kelurahan - Tanda terima bahan	
		b.	Hanya terdapat lampiran bahan saja tanpa tanda terima	50			
		c.	Bahan tidak dilampirkan dalam undangan	0			
5	SK Tim Pelaksana Musrenbang RKPD di Kelurahan	a.	Terdapat SK Tim Pelaksana (tertulis dan bertandatangan Camat) dimana unsur Tim Pelaksana sesuai dengan Perbup	100		SK Tim Pelaksana ditetapkan oleh Camat berjumlah paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang terdiri dari Lurah sebagai pengarah, Sekretaris Kelurahan sebagai Ketua, Staf Kelurahan sebagai Sekretaris dan anggota	
		b.	Terdapat SK Tim Pelaksana (tertulis dan bertandatangan Camat) dimana unsur Tim Pelaksana lebih dari 3 unsur tidak sesuai dengan Perbup	50 - 99			
		c.	Terdapat SK Tim Pelaksana (tertulis dan bertandatangan Camat) dimana semua unsur Tim Pelaksana tidak sesuai	10 - 49			
		d.	Tidak ada	0			
6	Rekapitulasi hasil Musrenbang RW a. Permasalahan pembangunan dan isu strategis b. Usulan prioritas kegiatan pembangunan	a.	Apabila pengisian form R1, R2, dan R4 diisi lengkap dan sesuai dengan Perbup oleh seluruh RW	100		Rekapitulasi usulan sebelum verifikasi	
		b.	Apabila pengisian form R1, R2, dan R4 diisi lengkap dan sesuai Perbup oleh >75% total RW yang ada	75 - 99			
		c.	Apabila pengisian form R1, R2 dan R4 diisi lengkap dan sesuai Perbup oleh >50% total RW yang ada	50 - 74			
		d.	Apabila pengisian form R1, R2 dan R4 kurang lengkap dan kurang sesuai dengan Perbup oleh seluruh atau sebagian RW	25 - 49			
		e.	Apabila hanya ada salah satu yang diisi form R1, R2 atau form R4, kurang lengkap dan kurang sesuai dengan Perbup oleh seluruh atau sebagian RW	5 - 24			
		f.	Tidak ada	0			

7	Berita Acara (BA) rekapitulasi hasil Musrenbang RW	a.	Tersedia BA dilengkapi dengan dokumen, foto, denah lokasi dan perkiraan rincian kebutuhan anggaran oleh seluruh RW	100				
		b.	Tersedia BA dilengkapi dengan dokumen, foto, denah lokasi dan perkiraan rincian kebutuhan anggaran oleh >75% total RW yang ada	75 - 99				
		c.	Tersedia BA dilengkapi dengan dokumen, foto, denah lokasi dan perkiraan rincian kebutuhan anggaran oleh >50% total RW yang ada	50 - 74				
		d.	Tersedia BA dimana lampiran kurang lengkap oleh seluruh RW	25 - 49				
		e.	Tidak ada	0				
8	Verifikasi usulan kegiatan prioritas RW: a. Surat Perintah (SP) Lurah b. Verifikasi administrasi dan lapangan	Surat Perintah Lurah untuk Tim Verifikasi					Surat Perintah tertulis dan bertandatangan Lurah berjumlah 3 orang terdiri dari unsur kelurahan, LPMK dan unsur lembaga RW/RT	
		a.	Terdapat SP Lurah (tertulis, bertandatangan Lurah) dan sesuai dengan Perbup	100				
		b.	Terdapat SP Lurah (tertulis, bertandatangan Lurah) dan unsur kurang sesuai dengan Perbup	50				
		c.	Tidak ada	0				
		Verifikasi Administrasi dan Lapangan					Lembar verifikasi semua usulan Musrenbang RW tertulis dan bertandatangan tim	
		a.	Form verifikasi diisi dengan lengkap dan jelas, bertandatangan Tim Verifikasi, verifikasi dilakukan pada semua usulan, dilaksanakan paling lambat 7 hari sebelum Musrenbang RKPD di Kelurahan	100				
		b.	Form verifikasi diisi kurang lengkap dan jelas, bertandatangan Tim Verifikasi, verifikasi dilakukan pada semua usulan, dilaksanakan paling lambat 7 hari sebelum Musrenbang RKPD di Kelurahan	75 - 99				
		c.	Form verifikasi diisi kurang lengkap dan jelas, bertandatangan Tim Verifikasi, verifikasi dilakukan pada sebagian usulan, dilaksanakan kurang dari 7 hari sebelum Musrenbang RKPD di Kelurahan	50 - 74				
		d.	Form verifikasi diisi kurang lengkap dan jelas, bertandatangan Tim Verifikasi kurang lengkap, verifikasi dilakukan pada sebagian usulan, dilaksanakan kurang dari 7 hari sebelum Musrenbang RKPD di Kelurahan	25 - 49				
		e.	Form verifikasi diisi kurang lengkap dan jelas, tidak bertandatangan Tim Verifikasi, verifikasi dilakukan pada sebagian usulan, dilaksanakan kurang dari 7 hari sebelum Musrenbang RKPD di Kelurahan	10 - 24				
		f.	Form verifikasi tidak diisi dan bertandatangan Tim verifikasi, verifikasi dilakukan pada sebagian usulan, dilaksanakan kurang dari 7 hari sebelum Musrenbang RKPD di Kelurahan (form VL hanya dilampirkan dan kosong)	5 - 9				
		g.	Tidak ada	0				

Rekapitulasi Verifikasi Hasil Musyawarah RW: a. rekapitulasi hasil verifikasi usulan kegiatan RW yang dinyatakan layak b. rekapitulasi usulan kegiatan dari lembaga kemasyarakatan kelurahan selain RW dan RT serta kelompok masyarakat di Kelurahan	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Usulan RW					
	a.	Terdapat form L1 (konsisten dengan rekapan semua kegiatan layak di R2) setelah melalui verifikasi layak	100			
	b.	Terdapat form L1, terdapat $\leq 25\%$ ada kegiatan diluar form R2 setelah melalui verifikasi layak	75			
	c.	Terdapat form L1, terdapat $\geq 25\%$ ada kegiatan diluar form R2 setelah melalui verifikasi layak	50			
	d.	Tidak ada form L1	0			
	Rekapitulasi Usulan Lembaga Masyarakat					
	a.	Terdapat form L2 (konsisten dengan rekapan semua kegiatan layak di R4) setelah melalui verifikasi layak	100			
	b.	Terdapat form L2, terdapat $\leq 25\%$ ada kegiatan diluar form R4 setelah melalui verifikasi layak	75			
	c.	Terdapat form L2, terdapat $\geq 25\%$ ada kegiatan diluar form R4 setelah melalui verifikasi layak	50			
	c.	Tidak ada form L2	0			

III. Tahap Pelaksanaan

1	Peserta				
a.	Keterwakilan lembaga kelurahan dan ormas	Hari I			<ul style="list-style-type: none"> - Lurah dan perangkat Lurah - LPMK - Tokoh Masyarakat - Kelompok masyarakat (LSM, Kelompok Tani, Forum Anak, Posyandu, dll) - Organisasi perempuan - TKPK Kelurahan - Akademisi/sekolah - Rumah Tangga Miskin - Penyandang disabilitas - Pengurus Partai Politik Tingkat Kelurahan - Unsur Masyarakat lain
a.	Terdapat 100% keterwakilan dari semua unsur	100			
b.	Kehadiran unsur 76% - 99% terwakilkan oleh unsur tersebut	75 - 90			
c.	Kehadiran unsur 50% - 75% terwakilkan oleh unsur tersebut	50 - 70			
d.	Kehadiran kurang dari 50% yang terwakilkan oleh unsur tersebut	25			
		Hari II			
a.	Terdapat 100% keterwakilan dari semua unsur	100			
b.	Kehadiran unsur 76% - 99% terwakilkan oleh unsur tersebut	75 - 90			
c.	Kehadiran unsur 50% - 75% terwakilkan oleh unsur tersebut	50 - 70			
d.	Kehadiran kurang dari 50% yang terwakilkan oleh unsur tersebut	25			
b.	Persentase kehadiran	Hari I			
		Jumlah undangan = orang			
		Jumlah yang hadir = orang			
		Persentase = %			
	a.	Kehadiran keseluruhan peserta > 75%	100		
	b.	Kehadiran keseluruhan peserta 51 - 74%	50		
	c.	Kehadiran keseluruhan peserta <50%	25		

		Hari II				
		Jumlah undangan = orang				
		Jumlah yang hadir = orang				
		Persentase = %				
		a.	Kehadiran keseluruhan peserta > 75%	100		
		b.	Kehadiran keseluruhan peserta 51 - 74%	50		
		c.	Kehadiran keseluruhan peserta <50%	25		
c	Unsur perempuan	Hari I			Keterwakilan perempuan yang hadir sekurang-kurangnya 30% dari jumlah peserta yang hadir	
		a.	Kehadiran peserta perempuan >30%	100		
		b.	Kehadiran peserta perempuan 10% - 30%	50		
		c.	Tidak ada sama sekali	0		
		Hari II				
		a.	Kehadiran peserta perempuan >30%	100		
		b.	Kehadiran peserta perempuan 10% - 30%	50		
		c.	Tidak ada sama sekali	0		
2	Narasumber					
a.	Tim Asistensi Kecamatan	Hari I				
		Undangan				
		a.	Diundang saat pelaksanaan Musrenbang RKPD Kelurahan	100		
		b.	Tidak diundang saat pelaksanaan Musrenbang RKPD Kelurahan	0		
		Kehadiran				
		a.	Hadir saat musrenbang RKPD Kelurahan	100		
		b.	Tidak hadir saat musrenbang RKPD Kelurahan	0		
		Hari II				
		Undangan				
		a.	Diundang saat pelaksanaan Musrenbang RKPD Kelurahan	100		
		b.	Tidak diundang saat pelaksanaan Musrenbang RKPD Kelurahan	0		
		Kehadiran				
	a.	Hadir saat musrenbang RKPD Kelurahan	100			
	b.	Tidak hadir saat musrenbang RKPD Kelurahan	0			
b.	DPRD daerah setempat	Hari I				
		Undangan				
		a.	Diundang saat pelaksanaan Musrenbang RKPD Kelurahan	100		
		b.	Tidak diundang saat pelaksanaan Musrenbang RKPD Kelurahan	0		
		Kehadiran				
		a.	Hadir saat musrenbang RKPD Kelurahan	100		
	b.	Tidak hadir saat musrenbang RKPD Kelurahan	0			

		Hari II				
		Undangan				
		a.	Diundang saat pelaksanaan Musrenbang RKPD Kelurahan	100		
		b.	Tidak diundang saat pelaksanaan Musrenbang RKPD Kelurahan	0		
		Kehadiran				
		a.	Hadir saat musrenbang RKPD Kelurahan	100		
		b.	Tidak hadir saat musrenbang RKPD Kelurahan	0		
3	Paparan Lurah	a.	Terdapat materi yang disampaikan dan dipaparkan (misalkan melalui powerpoint)	100		
		b.	Materi dibuat tetapi tidak dipaparkan, Lurah menyampaikan melalui lisan (misalkan seperti penyampaian sambutan)	50		
		c.	Materi dibuat dan dipaparkan oleh selain lurah	25		
		d.	Materi tidak dibuat dan tidak dipaparkan	0		

4 Musyawarah Bidang

a.	Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintah	Pelaksanaan			PD Pengampu: - Dindikpora - Dinas Kesehatan - Dinas Sosial - Dinpermades - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Bagian Kesra Setda - BPBD - DPPPAPPKB - Satpol PP Damkar - Badan kesbangpol - Dinkominfo	
		a.	Ada musyawarah bidang	100		
		b.	Tidak ada musyawarah bidang	0		
		Penilaian Peserta				
		a.	Penilaian menggunakan skoring	100		
		b.	Penilaian tidak menggunakan skoring	0		
		Keaktifan Peserta				
		a.	Anggota musyawarah bidang aktif dalam mengikuti musyawarah	100		
		b.	Anggota musyawarah bidang kurang aktif dalam mengikuti musyawarah	50		
b.	Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Pelaksanaan				PD Pengampu: - DPUPR - Dinas Perhubungan - Dinas KP, Pertanian dan Perikanan - Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan - Dinperakim LH - Dinperinaker - Dinbudpar - DPM - Bagian Perekonomian Setda
		a.	Ada musyawarah bidang	100		
		b.	Tidak ada musyawarah bidang	0		
		Penilaian Peserta				
		a.	Penilaian menggunakan skoring	100		
		b.	Penilaian tidak menggunakan skoring	0		
		Keaktifan Peserta				
		a.	Anggota musyawarah bidang aktif dalam mengikuti musyawarah	100		
		b.	Anggota musyawarah bidang kurang aktif dalam mengikuti musyawarah	50		
5	Penentuan prioritas kegiatan yang diusulkan dalam Musrenbang RKPD Kecamatan	a.	Penilaian menggunakan skoring	100	Masing-masing bidang maksimal 3 usulan kegiatan dengan PD pengampu berbeda	
		b.	Penilaian tidak menggunakan skoring	0		

6	Musyawarah Pleno	Pelaksanaan				
		a.	Runutan pelaksanaan sesuai dengan Perbup	100		
		b.	Runutan pelaksanaan kurang sesuai dengan Perbup	50		
		c.	Tidak ada	0		
		Hasil Musyawarah Pleno				
		a.	Dalam musyawarah pleno membahas dan menyepakati keempat hal sesuai Perbup	100		Musyawarah pleno dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati: 1. isu strategis dan permasalahan pembangunan di kelurahan 2. kelompok kegiatan yang akan dianggarkan dalam ADKel 3. kelompok kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD Kecamatan 4. delegasi Musrenbang RKPD di Kecamatan
		b.	Dalam musyawarah pleno membahas dan menyepakati tiga hal saja yang disebutkan dalam Perbup	75		
		c.	Dalam musyawarah pleno membahas dan menyepakati dua hal saja yang disebutkan dalam Perbup	50		
		d.	Dalam musyawarah pleno membahas dan menyepakati satu hal saja yang disebutkan dalam Perbup	0		
		7	Daftar usulan prioritas kegiatan sarpras lokal, pemberdayaan masyarakat dan operasional lembaga kemasyarakatan Kelurahan	a.	Ada daftar tersebut dan sesuai (form L10 sesuai dengan rekapitulasi form L3)	100
b.	Ada daftar tersebut dan kurang sesuai (≥ 1 kegiatan tidak sesuai antara form L10 dan form L3)			25 - 50		
c.	Tidak ada			0		
8	Daftar usulan prioritas kegiatan ke Musrenbang Kecamatan sumber dana APBD Kab. Temanggung	a.	Ada daftar tersebut dan sesuai (3 usulan kegiatan setiap bidang dengan PD pengampu berbeda)	100		Kegiatan APBD Kabupaten (ke Musrenbang Kecamatan) dibatasi maksimal 3 usulan kegiatan setiap bidang dengan PD pengampu yang berbeda
		b.	Ada daftar tersebut dan kurang sesuai (3 usulan kegiatan terdapat PD pengampu yang sama)	25 - 50		
		c.	Tidak ada	0		
9	Delegasi Musrenbang RKPD di Kecamatan	a.	Ada daftar delegasi dan sesuai (sekurang-kurangnya 1 orang perempuan dan unsur tercukupi)	100		Terdiri dari 3 orang (Lurah, LPMK, Unsur masyarakat), minimal 1 orang perempuan
		b.	Ada daftar delegasi dan kurang sesuai (tidak ada perempuan atau unsur belum tercukupi)	30 - 50		
		c.	Tidak ada	0		

10	Berita Acara (BA) Musyawarah Pleno	a.	Ada Berita Acara Musyawarah Pleno, lengkap dan sesuai	100		- Kelengkapan dan kesesuaian pada penilaian hasil pleno terdiri dari: 1. Permasalahan pembangunan dan isu strategis di kelurahan 2. Kelompok kegiatan yang akan dianggarkan dalam ADKel 3. Kelompok kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD Kecamatan 4. Delegasi Musrenbang RKPD di Kecamatan - Narasi dan pengesahan BA. Jika belum bisa mengeluarkan BA maka Tim Monitoring wajib merekap list usulan kegiatan per masing-masing bidang - Diserahkan pada hari kedua pelaksanaan Musrenbang
		b.	Ada Berita Acara Musyawarah Pleno, kurang sesuai, kurang lengkap	30 - 50		
		c.	Tidak ada	0		

IV. Catatan Khusus

Kontak person : Nama dan No HP Lurah/Sekretaris

HASIL EVALUASI
PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN

NO	KELURAHAN	Tahap Persiapan	%	Tahap Pelaksanaan	%	JUMLAH	RATA- RATA
Rata-rata Kabupaten							

Tim Evaluasi Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kelurahan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua Koordinator Tim Evaluasi	
2		Wakil ketua	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	
6		Anggota	

Mengetahui,

Kepala Bappeda
Kabupaten Temanggung,

PPTK Kegiatan,

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

.....

.....

BERITA ACARA
EVALUASI PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD TAHUN
KABUPATEN TEMANGGUNG DI KELURAHAN

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. (Ketua Koordinator Tim Evaluasi)
2. (Wakil ketua)
3. (Anggota)
4. (Anggota)
5. (Anggota)

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung Nomor: tanggal tentang Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kelurahan, telah melakukan evaluasi atas penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kelurahan dengan hasil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini. Selanjutnya Tim Monitoring Musrenbang RKPD di Kelurahan:

MENYEPAKATI:

- KESATU** : Hasil Evaluasi penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kelurahan Tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini.
- KEDUA** : Hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
- KETIGA** : Berita Acara ini dijadikan sebagai bahan penentuan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kelurahan terbaik se-Kabupaten Temanggung sesuai ketentuan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tim Evaluasi Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kelurahan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua Koordinator Tim Evaluasi	
2		Wakil ketua	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	
6		Anggota	

Mengetahui,
Kepala Bappeda
Kabupaten Temanggung,

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

.....

PPTK Kegiatan,

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

.....

IV. FORMAT USULAN PERUBAHAN HASIL MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN

PERUBAHAN USULAN KEGIATAN
HASIL MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN

No	sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Dasar dan Alasan Perubahan
	Kegiatan Prioritas	Indikator Kegiatan	lokasi	Volume	Pagu	Kegiatan Prioritas	Indikator Kegiatan	lokasi	Volume	Pagu	

Temanggung,

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1		Lurah		
2		Ketua LPMK		
3		Ketua RW		
4				
5				

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 105 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH

STANDAR NILAI SKORING DAN FORMAT DOKUMEN
PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN

I. STANDAR NILAI SKORING

NILAI SKORING
DALAM PENILAIAN PRIORITAS USULAN KEGIATAN
PADA MUSYAWARAH BIDANG

A. Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

No	INDIKATOR	KONDISI INDIKATOR	SKOR
1	Kesesuaian dengan Tema Tahunan RPJMD		
		Tidak sesuai tema Tahunan	0
		Sesuai Tema Tahunan	50
2	Urgensi		
		Tidak mendesak	1 s/d 15
		Mendesak	16 s/d 20
		Sangat mendesak	21 s/d 25
3	Jumlah Penerima Manfaat (Orang)		
		≤ 50	1 s/d 5
		50 – 100	6 s/d 10
		101 –150	11 s/d 15
		151 – 200	16 s/d 20
		> 200	21 s/d 25
4	Cakupan Manfaat		
		Dalam satu Desa/Kelurahan	1 s/d 10
		Antar desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan	11 s/d 15
		Antar Kecamatan	16 s/d 20

Keterangan :

1. Kolom 2 : Indikator yang dinilai
 - Indikator kesesuaian dengan tema tahunan RPJMD adalah untuk menilai kesesuaian antara usulan kegiatan dengan tema tahunan RPJMD
 - Indikator urgensi/kemendesakan adalah untuk menilai kegiatan yang harus segera diselesaikan.
 - Indikator jumlah penerima manfaat adalah untuk menilai kegiatan dengan mempertimbangkan jumlah penerima manfaat.
 - Indikator cakupan manfaat adalah untuk menilai kegiatan dengan mempertimbangkan jangkauan luas wilayah penerima manfaat.
2. Kolom 3 : Kondisi indikator usulan kegiatan
3. Kolom 4 : Standar skor/nilai menjadi hak dan menurut penilaian pribadi peserta

B. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

No	INDIKATOR	KONDISI INDIKATOR	SKOR
1	Kesesuaian dengan Tema Tahunan RPJMD		
		Tidak sesuai tema Tahunan	0
		Sesuai Tema Tahunan	50
2	Urgensi		
		Tidak mendesak	1 s/d 15
		Mendesak	16 s/d 20
		Sangat mendesak	21 s/d 25
3	Jumlah Penerima Manfaat (Orang)		
		≤ 100	1 s/d 5
		100 – 200	6 s/d 10
		201 – 300	11 s/d 15
		301 – 400	16 s/d 20
		> 400	21 s/d 25
4	Cakupan Manfaat		
		Dalam satu Desa/Kelurahan	1 s/d 10
		Antar desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan	11 s/d 15
		Antar Kecamatan	16 s/d 20

Keterangan :

1. Kolom 2 : Indikator yang dinilai

- Indikator kesesuaian dengan tema tahunan RPJMD adalah untuk menilai kesesuaian antara usulan kegiatan dengan tema tahunan RPJMD
- Indikator urgensi/kemendesakan adalah untuk menilai kegiatan yang harus segera diselesaikan.
- Indikator jumlah penerima manfaat adalah untuk menilai kegiatan dengan mempertimbangkan jumlah penerima manfaat.
- Indikator cakupan manfaat adalah untuk menilai kegiatan dengan mempertimbangkan jangkauan luas wilayah penerima manfaat.

2. Kolom 3 : Kondisi indikator usulan kegiatan

3. Kolom 4 : Standar skor/nilai menjadi hak dan menurut penilaian pribadi peserta

II. FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPDI DI KECAMATAN

REKAPITULASI USULAN PRIORITAS KEGIATAN HASIL MUSRENBANG DESA/KELURAHAN
 KECAMATAN
 BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN

No	Tema Tahunan RPJMD Tahun	Kebijakan Prioritas Tahunan RPJMD	Program	Prioritas Kegiatan	Indikator Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	PD pengampu

Kecamatan,

Camat,

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

.....

REKAPITULASI USULAN PRIORITAS KEGIATAN HASIL MUSRENBANG DESA/KELURAHAN
KECAMATAN
BIDANG EKONOMI, SUMBERDAYA ALAM, DAN INFRASTRUKTUR

No	Tema Tahunan RPJMD Tahun	Kebijakan Prioritas Tahunan RPJMD	Program	Prioritas Kegiatan	Indikator Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	PD pengampu

Kecamatan,

Camat,

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

.....

FORM PENILAIAN PESERTA MUSYAWARAH BIDANG
MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN

No	Tema Tahunan RPJMD Tahun	Kebijakan Prioritas Tahunan RPJMD Tahun	Program	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	LOKASI	VOLUME	PAGU(Rp)	SKOR				JUMLAH SKOR
										KESESUAIAN DENGAN TEMA RPJMD	URGENSI	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	CAKUPAN MANFAAT	

Peserta,

.....

FORM PENILAIAN PESERTA MUSYAWARAH BIDANG
MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN
BIDANG EKONOMI, SUMBERDAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR

No	Tema Tahunan RPJMD Tahun	Kebijakan Prioritas Tahunan RPJMD Tahun	Program	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	LOKASI	VOLUME	PAGU(Rp)	SKOR				JUMLAH SKOR
										KESESUAIAN DENGAN TEMA RPJMD	URGENSI	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	CAKUPAN MANFAAT	

Peserta,

.....

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PESERTA MUSYAWARAH
BIDANG

No	KEGIATAN	NAMA PESERTA MUSYAWARAH BIDANG								JUMLAH SKOR	KETERANGAN

.....,

Ketua Musyawarah Bidang

Tanda Tangan, Nama Terang

.....

DAFTAR URUTAN USULAN PRIORITAS KEGIATAN YANG AKAN DIUSULKAN PADA MUSRENBANG RKPD DI KABUPATEN
HASIL MUSYAWARAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN

No	Tema Tahunan RPJMD Tahun	Kebijakan Prioritas Tahunan RPJMD	Program	Prioritas Kegiatan	Indikator Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi (alamat lengkap)	Volume	Pagu	PD pengampu

.....,

Ketua Musyawarah Bidang

Tanda Tangan, Nama Terang

.....

Mewakili Peserta Musyawarah Bidang

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				

DAFTAR URUTAN USULAN PRIORITAS KEGIATAN YANG AKAN DIUSULKAN PADA MUSRENBANG RKPD DI KABUPATEN
HASIL MUSYAWARAH BIDANG EKONOMI, SUMBERDAYA ALAM, DAN INFRASTRUKTUR

No	Tema Tahunan RPJMD Tahun	Kebijakan Prioritas Tahunan RPJMD	Program	Prioritas Kegiatan	Indikator Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi (alamat lengkap)	Volume	Pagu	PD pengampu

.....,

Ketua Musyawarah Bidang

Tanda Tangan, Nama Terang

.....

Mewakili Peserta Musyawarah Bidang

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN

I. Permasalahan

1.

a. Permasalahan

-
-

b. Pemecahan Masalah

-
-

2.

a. Permasalahan

-
-

b. Pemecahan Masalah

-
-

II. Permasalahan

a. Permasalahan

-
-

b. Pemecahan Masalah

-
-

III. Isu Strategis

1.

2.

.....,

Ketua Musyawarah
Bidang,

Tanda Tangan dan Nama Terang

.....

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS
BIDANG EKONOMI, SUMBER DAYA ALAM, DAN INFRASTRUKTUR

I. Permasalahan

1.

a. Permasalahan

-
-

b. Pemecahan Masalah

-
-

2.

a. Permasalahan

-
-

b. Pemecahan Masalah

-
-

II. Permasalahan

a. Permasalahan

-
-

b. Pemecahan Masalah

-
-

III. Isu Strategis

1.
2.

.....,

Ketua Musyawarah
Bidang,

Tanda Tangan dan Nama Terang

.....

FORM BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN
MUSRENBANG KECAMATAN

Pada hari tanggal bulan tahun bertempat di telah diselenggarakan Musyawarah Bidang pada Musrenbang RKPD di Kecamatan yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan tanggapan dan saran dari seluruh peserta musyawarah kelompok terhadap materi yang dibahas dalam Musyawarah Bidang sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Musyawarah Bidang, maka pada:

Hari dan Tanggal :

J a m :

Tempat :

Musyawarah Bidang..... (sesuai bidangnya)

MENYEPAKATI:

KESATU : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas Bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

KEDUA : Hasil kesepakatan musyawarah bidang dalam Musrenbang Kecamatan Tahun dan Daftar Hadir Peserta Musyawarah Bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

KEEMPAT : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan pelaksanaan Musyawarah Pleno penetapan prioritas program dan kegiatan pada Musrenbang Kecamatan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal.....

Ketua Bidang

Tanda tangan

.....

Mewakili Peserta Musyawarah Kelompok

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
dst				

FORM BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH BIDANG
EKONOMI, SUMBERDAYA ALAM, DAN INFRASTRUKTUR
MUSRENBANG KECAMATAN

Pada hari tanggal bulan tahun bertempat di telah diselenggarakan Musyawarah Bidang pada Musrenbang RKPD di Kecamatan yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan tanggapan dan saran dari seluruh peserta musyawarah kelompok terhadap materi yang dibahas dalam Musyawarah Bidang sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Musyawarah Bidang, maka pada:

Hari dan Tanggal :

J a m :

Tempat :

Musyawarah Bidang..... (sesuai bidangnya)

MENYEPAKATI:

- KESATU : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas Bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.
- KEDUA : Hasil kesepakatan musyawarah bidang dalam Musrenbang Kecamatan Tahun... dan Daftar Hadir Peserta Musyawarah Bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KEEMPAT : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan pelaksanaan Musyawarah Pleno penetapan prioritas program dan kegiatan pada Musrenbang Kecamatan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal.....

Ketua Bidang

Tanda tangan

Nama

Mewakili Peserta Musyawarah Kelompok

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
dst				

FORM VERIFIKASI LAPANGAN
USULAN KEGIATAN HASIL MUSYAWARAH BIDANG
PADA MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN TAHUN

Telah dilakukan verifikasi usulan prioritas kegiatan hasil Musyawarah Bidang pada Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun ... pada hari tanggal bulan tahun dengan hasil sebagai berikut:

1. Kegiatan :
2. RAB
 - a. ada/tidak
 - b. Catatan Tim Verifikasi :

3. Foto
 - a. ada/tidak
 - b. Kesesuaian Foto dengan Lokasi : sesuai/tidak
4. Denah Lokasi
 - a. Ada/tidak
 - b. Kesesuaian Lokasi dengan Denah Lokasi
5. Status Tanah :
6. Kewenangan : Kelurahan/Kabupaten/Provinsi /Nasional
7. Hasil Akhir Verifikasi : Layak/Tidak Layak
8. Keterangan : -
 -

TIM VERIFIKASI HASIL MUSRENBANG DI KECAMATAN

No	Nama	Unsur	Tanda Tangan
1			
2			
3			

USULAN PRIORITAS KEGIATAN YANG AKAN DIUSULKAN PADA MUSRENBANG RKPD DI KABUPATEN
 BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN
 SUMBER DANA APBD KABUPATEN

No	Tema Tahunan RPJMD Tahun	Kebijakan Prioritas Tahunan RPJMD	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi (alamat lengkap)	Volume	Pagu	PD pengampu

.....,

Camat

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

.....

Mewakili Peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				

USULAN PRIORITAS KEGIATAN YANG AKAN DIUSULKAN PADA MUSRENBANG RKPD DI KABUPATEN
 BIDANG EKONOMI, SUMBER DAYA ALAM, DAN INFRASTRUKTUR
 SUMBER DANA APBD KABUPATEN

No	Tema Tahunan RPJMD Tahun	Kebijakan Prioritas Tahunan RPJMD	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi (alamat lengkap)	Volume	Pagu	PD pengampu

.....,

Camat

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

.....

Mewakili Peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				

USULAN PRIORITAS KEGIATAN YANG AKAN DIUSULKAN PADA MUSRENBANG RKPD DI KABUPATEN
SUMBER DANA APBD PROVINSI

No	Prioritas Kegiatan	Indikator Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi (alamat lengkap)	Volume	Pagu	PD pengampu

.....,

Camat

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

.....

Mewakili Peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				

USULAN PRIORITAS KEGIATAN YANG AKAN DIUSULKAN PADA MUSRENBANG RKPD DI KABUPATEN
SUMBER DANA APBN

No	Prioritas Kegiatan	Indikator Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi (alamat lengkap)	Volume	Pagu	PD pengampu

.....,

Camat

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

.....

Mewakili Peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DISEPAKATI (LONGLIST)

TAHUN :

KECAMATAN:

PERANGKAT DAERAH:

No	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ALASAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6

....., tanggal

CAMAT

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

.....

FORM USULAN KEGIATAN TEMATIK TAHUN
KECAMATAN
TEMA

No	Permasalahan	Isu Strategis	Program	Prioritas Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi (alamat lengkap)	Volume	Pagu	PD Penanggung jawab
1			2	3	4	5	6	7	8

....., tanggal

CAMAT

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

.....

FORM DAFTAR DELEGASI KECAMATAN
PADA FORUM PD DAN MUSRENBANG KABUPATEN TEMANGGUNG

No	NAMA	ALAMAT	LEMBAGA/INSTANSI/UNSUR
1			Camat
2			Unsur Kepala Desa
3			Unsur kelembagaan tingkat kecamatan
4			Unsur lembaga kemasyarakatan desa/Kelurahan
			(ada 1 orang keterwakilan perempuan)

....., tanggal

CAMAT

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

.....

Mewakili peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1		(unsur Kepala Desa/Lurah)		
2		unsur kelembagaan tingkat kecamatan		
3		unsur lembaga kemasyarakatan desa/Kelurahan		

FORM BERITA ACARA MUSRENBANG RKPD
DI KECAMATAN

Pada hari sampai dengan hari tanggal sampai dengan tanggal bulan tahun bertempat di telah diselenggarakan Musrenbang Kecamatan yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan Musrenbang Kecamatan.
2. Pemaparan materi lainnya (d disesuaikan dengan materi dan nama yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang Kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing Ketua Bidang sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Musrenbang Kecamatan, maka pada:

Hari dan Tanggal :

J a m :

Tempat :

Musrenbang Kecamatan (sesuai nama kecamatan)

MENYEPAKATI:

- KESATU : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas Kecamatan Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.
- KEDUA : Hasil kesepakatan dalam musyawarah pleno Musrenbang Kecamatan..... Tahun... dan Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KETIGA : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan untuk mengikuti Forum Perangkat Daerah Tahun

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal.....

Pimpinan Musyawarah/CAMAT

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

.....

Mewakili peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1		(unsur Kepala Desa/Lurah)		
2		unsur kelembagaan tingkat kecamatan		
3		unsur lembaga kemasyarakatan desa/Kelurahan		

III. FORMAT DOKUMEN EVALUASI PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN

Form: C12

KUESIONER
EVALUASI PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN
TAHUN
KECAMATAN :

I. Data Umum				Kriteria menurut Perbup		
1	Nama Kecamatan	:				
2	Jumlah Desa/Kelurahan	:				
3	Tanggal Musrenbang					
	Hari I	:				
	Hari II	:				
4	Tempat					
	Hari I	:				
	Hari II	:				
II. Tahap Persiapan						
No.	Unsur yang Dinilai	Kriteria	Skor	Skor Evaluasi	Keterangan	Catatan
1	SK Tim Pelaksana Musrenbang RKPD di Kecamatan	a. Terdapat SK Tim Pelaksana (tertulis dan bertandatangan Camat) dimana unsur Tim Pelaksana sesuai dengan Perbup	100		SK Tim Pelaksana ditetapkan oleh Camat berjumlah paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang terdiri dari Camat sebagai pengarah, Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua, Kasi PMD sebagai Sekretaris, dan lainnya sebagai anggota	
		b. Terdapat SK Tim Pelaksana (tertulis dan bertandatangan Camat) dimana unsur Tim Pelaksana lebih dari 3 unsur tidak sesuai dengan Perbup	50 - 99			
		c. Terdapat SK Tim Pelaksana (tertulis dan bertandatangan Camat) dimana semua unsur Tim Pelaksana tidak sesuai	10 - 49			
		d. Tidak ada	0			
2	Pengiriman undangan Musrenbang RKPD Kecamatan ke peserta	a. Terdapat undangan Musrenbang RKPD Kecamatan dan tanda terima undangan ke semua peserta, dikirimkan \geq 3 hari sebelum pelaksanaan	100		- Selambat-lambatnya 3 hari sebelum Musrenbang RKPD di Kecamatan - Tanda terima undangan	
		b. Terdapat undangan Musrenbang RKPD, tanda terima ke sebagian peserta, dikirimkan \geq 3 hari sebelum pelaksanaan	75 - 99			
		c. Terdapat undangan Musrenbang RKPD, tanpa tanda terima undangan, dikirimkan \geq 3 hari sebelum pelaksanaan	50 - 74			

		d.	Terdapat undangan Musrenbang RKPD, tanpa tanda terima undangan, dikirimkan ≤ 3 hari sebelum pelaksanaan	25 - 49			
		e.	Tidak ada undangan Musrenbang RKPD	0			
3	Undangan dilampiri bahan Musrenbang RKPD di Kecamatan	a.	Bahan dilampirkan pada undangan beserta tanda terima bahan	100		<ul style="list-style-type: none"> - Undangan harus dilampiri bahan Musrenbang RKPD Kecamatan yang terdiri dari: 1. rekapitulasi hasil musrenbang Desa/Kelurahan 2. hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD - Tanda terima bahan 	
		b.	Hanya terdapat lampiran bahan saja tanpa tanda terima	50			
		c.	Bahan tidak dilampirkan dalam undangan	0			
4	Rekapitulasi hasil Musrenbang Desa/Kelurahan a. Usulan prioritas kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah b. Usulan prioritas kegiatan yang merupakan kewenangan Desa dan kegiatan Skala Kelurahan yang tidak terakomodir dalam ADKel	a.	Apabila pengisian form C1A dan C1B diisi lengkap dan sesuai dengan Perbup	100		<ul style="list-style-type: none"> - Usulan prioritas kegiatan kewenangan Daerah maksimal 3 kegiatan per bidang dengan PD pengampu yang berbeda - Usulan prioritas kegiatan yang tidak terakomodir ADKel maksimal 3 kegiatan 	
		b.	Apabila pengisian form C1A dan C1B diisi lengkap dan sesuai Perbup oleh >75% total desa/kelurahan yang ada	75 - 99			
		c.	Apabila pengisian form C1A dan C1B diisi lengkap dan sesuai Perbup oleh >50% total desa/kelurahan yang ada	50 - 74			
		d.	Apabila pengisian form C1A dan C1B kurang lengkap dan kurang sesuai dengan Perbup oleh seluruh atau sebagian desa/kelurahan	25 - 49			
		e.	Apabila hanya ada salah satu yang diisi form C1A dan C2B, kurang lengkap dan kurang sesuai dengan Perbup oleh seluruh atau sebagian desa/kelurahan	5 - 24			
		f.	Tidak ada	0			

III. Tahap Pelaksanaan

1	Peserta						
a.	Keterwakilan lembaga kelurahan dan ormas	Hari I					<ul style="list-style-type: none"> - Camat, Sekcam, Kasubag, Kasi, unsur staf Kecamatan - Pengurus parpol kecamatan - Anggota DPRD dapil tempat - Delegasi Desa dan/atau Kelurahan - TPK Tingkat Kecamatan - Organisasi kemasyarakatan (TP PKK Kecamatan, Gapoktan, forum anak, organisasi pemuda, organisasi keagamaan, dll) - Kelompok profesi (IDI, Asosiasi Petani, IBI, dll) - Rumah Tangga Miskin - Penyandang Disabilitas - Unsur pendidikan/akademisi - Unsur masyarakat lain
		a.	Terdapat 100% keterwakilan dari semua unsur	100			
		b.	Kehadiran unsur 76% - 99% terwakilkan oleh unsur tersebut	75 - 90			
		c.	Kehadiran unsur 50% - 75% terwakilkan oleh unsur tersebut	50 - 70			
		d.	Kehadiran kurang dari 50% yang terwakilkan oleh unsur tersebut	25			

		Hari II				
		a.	Terdapat 100% keterwakilan dari semua unsur	100		
		b.	Kehadiran unsur 76% - 99% terwakilkan oleh unsur tersebut	75 - 90		
		c.	Kehadiran unsur 50% - 75% terwakilkan oleh unsur tersebut	50 - 70		
		d.	Kehadiran kurang dari 50% yang terwakilkan oleh unsur tersebut	25		
b	Persentase kehadiran	Hari I				
		Jumlah undangan = orang				
		Jumlah hadir = orang				
		Persentase = %				
		a.	Kehadiran keseluruhan peserta > 75%	100		
		b.	Kehadiran keseluruhan peserta 51 - 74%	50		
		c.	Kehadiran keseluruhan peserta <50%	25		
		Hari II				
		Jumlah undangan = orang				
		Jumlah hadir = orang				
		Persentase = %				
		a.	Kehadiran keseluruhan peserta > 75%	100		
		b.	Kehadiran keseluruhan peserta 51 - 74%	50		
		c.	Kehadiran keseluruhan peserta <50%	25		
c	Unsur perempuan	Hari I				Keterwakilan perempuan yang hadir sekurang-kurangnya 30% dari jumlah peserta yang hadir
		a.	Kehadiran peserta perempuan >30%	100		
		b.	Kehadiran peserta perempuan 10% - 30%	50		
		c.	Tidak ada sama sekali	0		
		Hari II				
		a.	Kehadiran peserta perempuan >30%	100		
		b.	Kehadiran peserta perempuan 10% - 30%	50		
		c.	Tidak ada sama sekali	0		
2	Narasumber	Hari I				
a.	Tim Asistensi Kabupaten	Undangan				
		a.	Diundang saat pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan	100		
		b.	Tidak diundang saat pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan	0		
		Kehadiran				
		a.	Hadir saat musrenbang RKPD Kecamatan	100		
		b.	Tidak hadir saat musrenbang RKPD Kecamatan	0		

		Hari II			
		Undangan			
		a.	Diundang saat pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan	100	
		b.	Tidak diundang saat pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan	0	
		Kehadiran			
		a.	Hadir saat musrenbang RKPD Kecamatan	100	
		b.	Tidak hadir saat musrenbang RKPD Kecamatan	0	
b.	DPRD daerah pemilihan setempat	Hari I			
		Undangan			
		a.	Diundang saat pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan	100	
		b.	Tidak diundang saat pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan	0	
		Kehadiran			
		a.	Hadir saat musrenbang RKPD Kecamatan	100	
		b.	Tidak hadir saat musrenbang RKPD Kecamatan	0	
		Hari II			
		Undangan			
		a.	Diundang saat pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan	100	
		b.	Tidak diundang saat pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan	0	
		Kehadiran			
		a.	Hadir saat musrenbang RKPD Kecamatan	100	
		b.	Tidak hadir saat musrenbang RKPD Kecamatan	0	
c.	Perangkat Daerah	Hari I			
	Dindikpora	Hari I			
		a.	Hadir	100	
		b.	Tidak hadir	0	
		Hari II			
		a.	Hadir	100	
		b.	Tidak hadir	0	
	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Hari I			
		a.	Hadir	100	
		b.	Tidak hadir	0	
		Hari II			
		a.	Hadir	100	
		b.	Tidak hadir	0	
	Dinkes	Hari I			
		a.	Hadir	100	
		b.	Tidak hadir	0	
		Hari II			
		a.	Hadir	100	
		b.	Tidak hadir	0	

Dinsos	Hari I				
	a.	Hadir	100		
	b.	Tidak hadir	0		
	Hari II				
	a.	Hadir	100		
	b.	Tidak hadir	0		
Dinpermades	Hari I				
	a.	Hadir	100		
	b.	Tidak hadir	0		
	Hari II				
	a.	Hadir	100		
	b.	Tidak hadir	0		
BPBD	Hari I				
	a.	Hadir	100		
	b.	Tidak hadir	0		
	Hari II				
	a.	Hadir	100		
	b.	Tidak hadir	0		
DP3AP2KB	Hari I				
	a.	Hadir	100		
	b.	Tidak hadir	0		
	Hari II				
	a.	Hadir	100		
	b.	Tidak hadir	0		
Satpol PP dan Damkar	Hari I				
	a.	Hadir	100		
	b.	Tidak hadir	0		
	Hari II				
	a.	Hadir	100		
	b.	Tidak hadir	0		
Dinas Kominfo	Hari I				
	a.	Hadir	100		
	b.	Tidak hadir	0		
	Hari II				
	a.	Hadir	100		
	b.	Tidak hadir	0		
Bakesbangpol	Hari I				
	a.	Hadir	100		
	b.	Tidak hadir	0		
	Hari II				
	a.	Hadir	100		
	b.	Tidak hadir	0		
Bag. Kesra Setda	Hari I				
	a.	Hadir	100		
	b.	Tidak hadir	0		
	Hari II				
	a.	Hadir	100		
	b.	Tidak hadir	0		

	Dinkop UKM dan Perdagangan	Hari I				
		a.	Hadir	100		
		b.	Tidak hadir	0		
		Hari II				
		a.	Hadir	100		
		b.	Tidak hadir	0		
	Dinbudpar	Hari I				
		a.	Hadir	100		
		b.	Tidak hadir	0		
		Hari II				
		a.	Hadir	100		
		b.	Tidak hadir	0		
	Dinperinaker	Hari I				
		a.	Hadir	100		
		b.	Tidak hadir	0		
		Hari II				
		a.	Hadir	100		
		b.	Tidak hadir	0		
	Dinas KP, Pertanian dan Perikanan	Hari I				
		a.	Hadir	100		
		b.	Tidak hadir	0		
		Hari II				
		a.	Hadir	100		
		b.	Tidak hadir	0		
	Dinperakim LH	Hari I				
		a.	Hadir	100		
		b.	Tidak hadir	0		
		Hari II				
		a.	Hadir	100		
		b.	Tidak hadir	0		
	DPUPR	Hari I				
		a.	Hadir	100		
		b.	Tidak hadir	0		
		Hari II				
		a.	Hadir	100		
		b.	Tidak hadir	0		
	DPM	Hari I				
		a.	Hadir	100		
		b.	Tidak hadir	0		
		Hari II				
		a.	Hadir	100		
		b.	Tidak hadir	0		
	Dinas Perhubungan	Hari I				
		a.	Hadir	100		
		b.	Tidak hadir	0		
		Hari II				
		a.	Hadir	100		
		b.	Tidak hadir	0		

	Bag. Perekonomian Setda	Hari I				
		a.	Hadir	100		
		b.	Tidak hadir	0		
		Hari II				
		a.	Hadir	100		
		b.	Tidak hadir	0		
d.	Unsur forum koordinasi pimpinan Camat	Hari I				
		a.	Ada	100		
		b.	Tidak ada	0		
		Hari II				
		a.	Ada	100		
		b.	Tidak ada	0		
	Komandan Rayon Militer	Hari I				
		a.	Diundang dan hadir	100		
		b.	Diundang tidak hadir	50		
		c.	Tidak diundang	0		
		Hari II				
		a.	Diundang dan hadir	100		
		b.	Diundang tidak hadir	50		
		c.	Tidak diundang	0		
	Kepala Kepolisian Sektor	Hari I				
		a.	Diundang dan hadir	100		
		b.	Diundang tidak hadir	50		
		c.	Tidak diundang	0		
		Hari II				
		a.	Diundang dan hadir	100		
		b.	Diundang tidak hadir	50		
		c.	Tidak diundang	0		
3	Paparan Camat	a.	Terdapat materi yang disampaikan dan dipaparkan (misalkan melalui powerpoint)	100		
		b.	Materi tidak dipaparkan, Camat menyampaikan melalui lisan (misalkan seperti penyampaian sambutan)	50		
4	Musyawarah Bidang					
a.	Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintah	Pelaksanaan			PD Pengampu: - Dindikpora - Dinas Kesehatan - Dinas Sosial - Dinpermades - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Bagian Kesra Setda - BPBD - DPPPAPPKB - Satpol PP Damkar - Badan Kesbangpol - Dinkominfo	
		a.	Ada musyawarah bidang	100		
		b.	Tidak ada musyawarah bidang	0		
		Penilaian Peserta				
		a.	Penilaian menggunakan skoring	100		
		b.	Penilaian tidak menggunakan skoring	0		
		Keaktifan Peserta				
		a.	Anggota musyawarah bidang aktif dalam mengikuti musyawarah	100		
	b.	Anggota musyawarah bidang kurang aktif dalam mengikuti musyawarah	50			

b.	Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Pelaksanaan			PD Pengampu: - DPUPR - Dinas Perhubungan - Dinas KP, Pertanian dan Perikanan - Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan - Dinperakim LH - Dinperinaker - Dinbudpar - DPM - Bagian Perekonomian Setda	
		a.	Ada musyawarah bidang	100		
		b.	Tidak ada musyawarah bidang	0		
		Penilaian Peserta				
		a.	Penilaian menggunakan skoring	100		
		b.	Penilaian tidak menggunakan skoring	0		
		Keaktifan Peserta				
		a.	Anggota musyawarah bidang aktif dalam mengikuti musyawarah	100		
b.	Anggota musyawarah bidang kurang aktif dalam mengikuti musyawarah	50				
5	Penentuan prioritas kegiatan yang diusulkan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten	a.	Penilaian menggunakan skoring	100	Masing-masing bidang maksimal 3 usulan kegiatan dengan PD pengampu berbeda	
		b.	Penilaian tidak menggunakan skoring	0		
6	Verifikasi usulan kegiatan prioritas hasil musyawarah bidang:	Kesesuaian Tim Verifikasi			Verifikasi usulan kegiatan prioritas hasil musyawarah bidang dilakukan oleh Tim Pelaksana Musrenbang RKPD Kecamatan bersama PD Pengampu	
		a.	Verifikasi dilakukan oleh Tim Pelaksana bersama Perangkat Daerah Pengampu sesuai dengan bidangnya	100		
		b.	Verifikasi hanya dilakukan oleh Tim Pelaksana saja, tanpa Perangkat Daerah Pengampu (ataupun sebaliknya)	50		
		c.	Tidak dilakukan verifikasi	0		
		Verifikasi Administrasi dan Lapangan			Lembar verifikasi semua usulan prioritas tertulis dan bertandatangan tim	
a.	Form verifikasi diisi dengan lengkap dan jelas, bertandatangan Tim, verifikasi dilakukan pada semua usulan, dilaksanakan sebelum pelaksanaan musyawarah pleno Musrenbang RKPD Kecamatan	100				
b.	Form verifikasi diisi kurang lengkap dan jelas, bertandatangan Tim, verifikasi dilakukan pada semua usulan, dilaksanakan sebelum pelaksanaan musyawarah pleno Musrenbang RKPD Kecamatan	75 - 99				

		c.	Form verifikasi diisi kurang lengkap dan jelas, bertandatangan Tim, verifikasi dilakukan pada sebagian usulan, dilaksanakan sebelum pelaksanaan musyawarah pleno Musrenbang RKPD Kecamatan	50 - 74			
		d.	Form verifikasi diisi kurang lengkap dan jelas, bertandatangan Tim kurang lengkap, verifikasi dilakukan pada sebagian usulan, dilaksanakan sebelum pelaksanaan musyawarah pleno Musrenbang RKPD Kecamatan	25 - 49			
		e.	Form verifikasi diisi kurang lengkap dan jelas, tidak bertandatangan Tim, verifikasi dilakukan pada sebagian usulan, dilaksanakan sebelum pelaksanaan musyawarah pleno Musrenbang RKPD Kecamatan	10 - 24			
		f.	Form verifikasi tidak diisi dan bertandatangan Tim, verifikasi dilakukan pada sebagian usulan, dilaksanakan sebelum pelaksanaan musyawarah pleno Musrenbang RKPD Kecamatan (form VC hanya dilampirkan dan kosongan)	5 - 9			
		g.	Tidak ada	0			
7	Penilaian Musyawarah Pleno	a.	Kesesuaian pelaksanaan musyawarah pleno	100			
		b.	Kurang sesuai pelaksanaan musyawarah pleno	50			
		c.	Tidak ada	0			
8	Daftar usulan prioritas kegiatan ke Musrenbang RKPD Kabupaten	a.	Ada daftar tersebut dan sesuai (3 usulan kegiatan setiap bidang dengan PD pengampu berbeda)	100		Kegiatan yang diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten dibatasi maksimal 3 usulan kegiatan setiap bidang dengan PD pengampu yang berbeda	
		b.	Ada daftar tersebut dan kurang sesuai (3 usulan kegiatan terdapat PD pengampu yang sama)	25 - 50			
		c.	Tidak ada	0			
9	Daftar usulan prioritas kegiatan yang dianggarkan dalam pagu indikatif umum Kecamatan	a.	Ada daftar tersebut dan sesuai	100			
		b.	Ada daftar tersebut dan kurang sesuai	25 - 50			
		c.	Tidak ada	0			
10	Daftar usulan prioritas kegiatan yang dianggarkan dalam pagu indikatif tematik Kecamatan	a.	Ada daftar tersebut dan sesuai	100			
		b.	Ada daftar tersebut dan kurang sesuai	25 - 50			
		c.	Tidak ada	0			

11	Delegasi Musrenbang RKPD di Kabupaten	a.	Ada daftar delegasi dan sesuai (sekurang-kurangnya 1 orang perempuan dan unsur tercukupi)	100		Terdiri dari 4 orang yaitu Camat/pejabat struktural lain jika Camat berhalangan hadir, Kasi PMD, unsur kepala desa/lurah, unsur kelembagaan tingkat kecamatan
		b.	Ada daftar delegasi dan kurang sesuai (tidak ada perempuan atau unsur belum tercukupi)	30 - 50		
		c.	Tidak ada	0		
12	Berita Acara (BA) Musyawarah Pleno	a.	Ada Berita Acara Musyawarah Pleno, lengkap dan sesuai	100		<p>- Narasi dan pengesahan BA. Ditandatangani oleh Ketua Musyawarah Pleno, Sekretaris Musyawarah Pleno, 3 orang perwakilan peserta dengan salah satunya perempuan</p> <p>- Hasil musyawarah pleno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan permasalahan pembangunan dan isu strategis 2. Penetapan usulan kegiatan yang akan dianggarkan dalam pagu indikatif umum Kecamatan 3. Penetapan kegiatan yang akan dianggarkan dalam pagu indikatif tematik Kecamatan 4. Penetapan delegasi kecamatan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten
		b.	Ada Berita Acara Musyawarah Pleno, kurang sesuai, kurang lengkap	30 - 50		
		c.	Tidak ada	0		

IV. Catatan Khusus

Nomor Dapil :
DPRD yang hadir :
(Nama/jabatan/fraksi/komisi)

Kontak person : Nama dan No HP
Camat dan Kasi PMD

**HASIL EVALUASI
PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN**

NO	KECAMATAN	Tahap Persiapan	%	Tahap Pelaksanaan	%	JUMLAH	RATA-RATA
Rata-rata Kabupaten							

Tim Evaluasi Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua Koordinator Tim Evaluasi	
2		Wakil ketua	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	
6		Anggota	

Mengetahui,

Kepala Bappeda
Kabupaten Temanggung,

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

.....

PPTK Kegiatan,

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

.....

BERITA ACARA
EVALUASI PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD TAHUN
KABUPATEN TEMANGGUNG DI KECAMATAN

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. (Ketua Koordinator Tim Evaluasi)
- 2. (Wakil ketua)
- 3. (Anggota)
- 4. (Anggota)
- 5. (Anggota)

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung Nomor: tanggal tentang Pelaksanaan Asistensi dan Monitoring Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan, telah melakukan evaluasi atas penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan dengan hasil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini. Selanjutnya Tim Asistensi dan Monitoring Musrenbang RKPD di Kecamatan:

MENYEPAKATI:

- KESATU : Hasil Evaluasi penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini.
- KEDUA : Hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
- KETIGA : Berita Acara ini dijadikan sebagai bahan penentuan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan terbaik se-Kabupaten Temanggung sesuai ketentuan peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tim Evaluasi Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua Koordinator Tim Evaluasi	
2		Wakil ketua	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	
6		Anggota	

Mengetahui
Kepala Bappeda
Kabupaten Temanggung,

PPTK Kegiatan,

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

Tanda Tangan, Cap, Nama Terang

.....

.....

IV. FORMAT PERUBAHAN USULAN PRIORITAS KEGIATAN HASIL MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN

PERUBAHAN USULAN KEGIATAN
HASIL MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Dasar dan Alasan Perubahan
	Kegiatan Prioritas	Indikator Kegiatan	lokasi	Volume	Pagu	Kegiatan Prioritas	Indikator Kegiatan	lokasi	Volume	Pagu	

Temanggung,

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1		Camat		
2		Unsur organisasi tingkat kecamatan		
3		Seluruh Kepala Desa/Lurah		
4		Peserta penandatanganan BA		
5				

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

